

# PENGARUH INDEKS DEMOKRASI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2009-2019

**Ebi Susanti\***

*Universitas Tanjungpura, Indonesia*

**Nurul Bariyah<sup>2</sup>**

*Universitas Tanjungpura, Indonesia*

## ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of the effect of the Indonesian Democracy Index on poverty in 34 Provinces in Indonesia from 2009-2019. In researching the Democracy Index, three aspects are used, namely the aspect of civil liberties, the aspect of political rights, the aspect of democratic institutions, and poverty which is measured by the percentage of the population living below the poverty line. The effect of the Democracy Index on poverty was analyzed using EViews 10 using data sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS). This study uses multiple linear regression with a fixed effect model (FEM). Partially, the aspects of civil liberties have a positive and significant effect on poverty, while the aspects of political rights and democratic institutions have a negative and significant effect on poverty. Taken together, the three independent variables have a significant effect on poverty, with a coefficient of determination of 94,40%.

Keywords: Democracy Index, Poverty

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia terhadap Kemiskinan pada 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2009-2019. Dalam meneliti Indeks Demokrasi menggunakan ketiga aspek yaitu Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi serta Kemiskinan yang diukur dengan persentase dari jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Pengaruh Indeks Demokrasi terhadap Kemiskinan dianalisis menggunakan Eviews 10 dengan menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Secara parsial variabel Aspek Kebebasan Sipil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel Aspek Hak-Hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara bersama-sama, ketiga variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 94,49%.

**Kata Kunci:** Indeks Demokrasi; Kemiskinan

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan di sebuah negara menjadi tolak ukur dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga masalah kemiskinan perlu diperhatikan dan diatasi. Karena tingginya tingkat kemiskinan dapat menghambat percepatan pada *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dimana pengentasan kemiskinan adalah tujuan pertama untuk diperhatikan. Bappenas (2020) menyatakan bahwa yang menjadi faktor bertambahnya kemiskinan ialah dari kurangnya perbaikan dalam indeks demokrasi. Adanya kemiskinan dapat menimbulkan beberapa masalah di tengah-

---

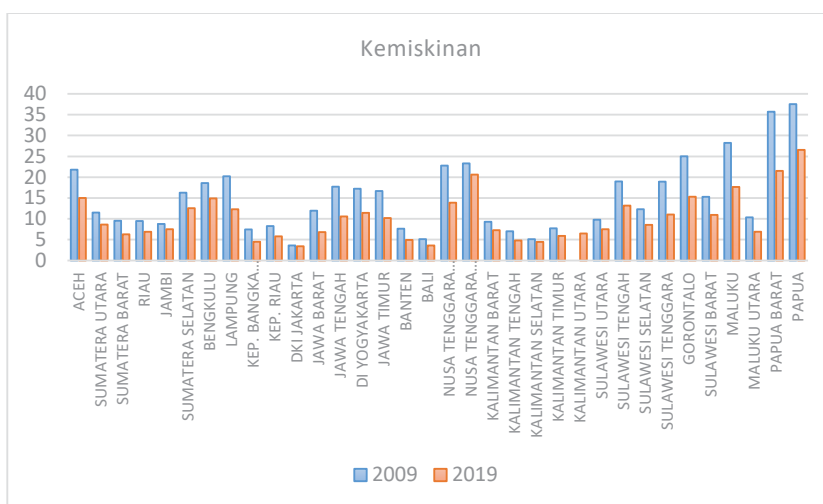
<sup>1</sup>ebisusanti@student.untan.ac.id

tengah masyarakat seperti munculnya kasus sosial, ekonomi maupun politik (Margareni et al., 2016). Berdasarkan fakta mengenai kemiskinan, terdapat 24.786 juta yang termasuk kriteria penduduk miskin dari 266. 912 juta warga di Indonesia (BPS, 2019). Terlebih lagi dilihat pada data tingkat kemiskinan menunjukkan lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan (BPS, 2020).

Suatu kondisi yang terdapat serba kekurangan seperti modal yang dimiliki terbatas, pengetahuan maupun keterampilan rendah, produktivitas rendah, serta keterbatasan pada kesempatan untuk berperan dalam pembangunan telah memberikan gambaran mengenai kemiskinan. Sehingga dari kondisi tersebut perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan melalui sistem demokrasi. Fahmi (2019) menyatakan bahwa sistem demokrasi dapat membentuk sebuah terselenggaranya pemerintahan yang bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satunya beberapa negara di Afrika seperti Ghana dengan skor demokrasi 6,5 dan rasio jumlah penduduk miskin menurun menjadi 23% dan Senegal dengan skor demokrasi 5,6 dan rasio jumlah penduduk miskin menurun menjadi 9,3% serta Islandia dengan skor demokrasi 9,4 dan rasio jumlah penduduk miskin sebesar 8,8. Terdapat mazhab historismus menyatakan bahwa dalam mencapai pembangunan sebuah perekonomian perlu adanya peranan pemerintah (Arsyad, 2016).

Hambatan yang paling erat terkait perkembangan ekonomi diakibatkan adanya kemiskinan disebabkan karena kurangnya penegakan hukum, kebijakan yang belum dilakukan dengan baik serta adanya ketidakstabilan politik (Jhingan, 2016). Mongolia merupakan negara demokrasi tidak sempurna dengan skor 6,5 masih berada pada tingkat kemiskinan sebesar 28% yang mendapatkan survei sebesar 80% responden percaya kebijakan yang dibuat pemerintah masih belum bisa diselesaikan secara penuh termasuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Tuya, 2013). Negara Afrika Selatan dengan skor demokrasi 7,05 menunjukkan rasio penduduk miskin 55% dan gini sebesar 0,62 sehingga memberikan dampak pada kemiskinan dan ketidaksetaraan yang terus berlanjut (Seekings, 2013). Kebijakan pembangunan yang dibuat oleh suatu negara belum mampu dalam mengatasi masalah pengurangan kemiskinan tanpa adanya partisipasi warga (Roberto & Araujo, 2015).

Permasalahan mengenai kemiskinan di Indonesia masih tergolong dalam kategori tinggi yang terjadi karena masalah struktural. Temuan lain mengungkapkan bahwa mengenai masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia terjadi karena adanya disparitas ekonomi dan otoritas negara yang lemah dalam menjaga kondisi keadilan sosial (Suhardin, 2012). Jadi, terkait masalah tersebut perlu adanya perhatian dengan kebijakan yang dijalankan sehingga menunjukkan tidak berjalan dengan baik dalam pengentasan kemiskinan. Dengan adanya tata kelola demokrasi yang baik maka bisa mencapai perubahan maupun kebijakan yang diinginkan termasuk dalam mengurangi kemiskinan (Fahmi, 2019).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2009-2019)

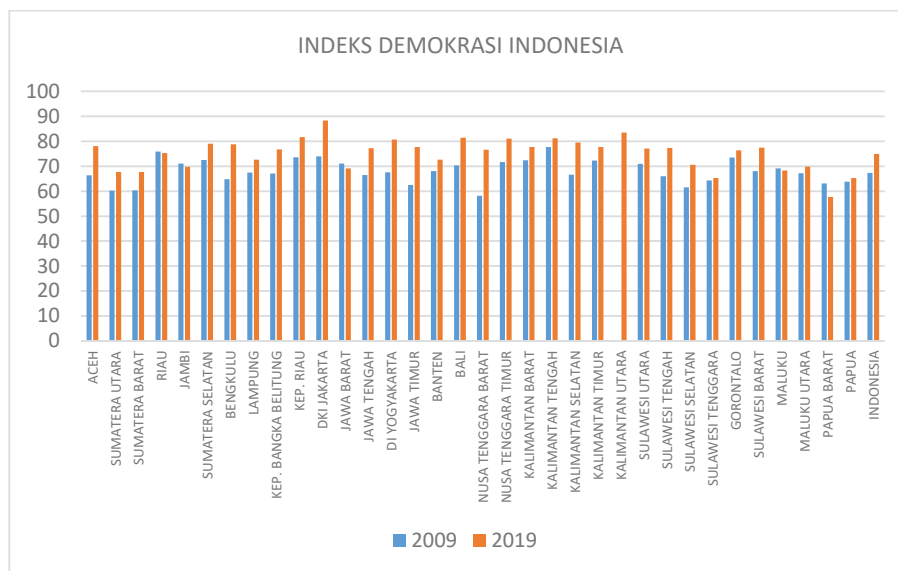
Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009 dan 2019

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia dengan rentang waktu tahun 2009 dan 2019 terjadi fluktuatif yang relatif menurun secara signifikan tetapi masih terlihat menurun secara lambat. Jadi, tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa terjadi perbaikan namun masih memperlihatkan bahwa perlu memperhatikan perbaikan maupun kebijakan yang telah dibuat dengan baik. Pada tahun 2009, persentase penduduk miskin sebesar 14,15 atau setara dengan 32.529,97 juta jiwa penduduk miskin. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 9,22 atau setara dengan 24.785,87 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan terjadi penurunan walaupun cukup lambat. Sedangkan perkembangan tingkat penduduk miskin 3 provinsi tertinggi dan 3 provinsi terendah di Indonesia menunjukkan yang tertinggi adalah Provinsi Papua sebesar 26,55 yang diikuti Provinsi Papua Barat sebesar 21,51 dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 20,62. Sedangkan tingkat kemiskinan yang terendah adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,42 diikuti dengan provinsi Bali sebesar 3,61 dan Kalimantan Selatan sebesar 4,47.

Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan yang tertinggi adalah Provinsi Papua sebesar 26,55. Kemiskinan yang tinggi di Papua karena faktor struktural yang dimana tingkat aksesibilitas pada lembaga pelayanan rendah salah satunya pada infrastruktur seperti kualitas jalan, ketersediaan air bersih dan listrik, ketersediaan tenaga medis, pendidikan maupun pembangunan irigasi sehingga hal ini dapat menghambat aktivitas masyarakat (Wahyuni & Damayanti, 2014). Sedangkan tingkat kemiskinan yang terendah adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,42 yang dimana merupakan pusat aktivitas bagi masyarakat, pusat administrasi pemerintahan dan keuangan yang memiliki fasilitas lengkap serta memiliki banyak kualitas sumber daya manusia yang tinggi sehingga mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam mengatasi kemiskinan termasuk keberhasilan dalam menjaga kestabilan harga. Dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan masih tinggi yang dilihat pada provinsi tersebut diikuti dengan jumlah penduduk yang kian meningkat.

Kemiskinan yang meningkat terjadi karena dalam merumuskan maupun membuat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang diperhatikan (Ma'arif, 2012). Sunaryo (2017) mendefinisikan demokrasi sebagai suatu keadaan yang memiliki keterbukaan maupun kebebasan dalam menyampaikan pendapat serta memberikan dukungan untuk mencapai kesejahteraan sehingga disebut sebagai demokrasi substansif. Menurut data terkini dari The Economist

Intelligence Unit telah merilis mengenai indeks demokrasi tahun 2019 di beberapa negara dan salah satunya Indonesia yang berada pada peringkat ke 64 dari 167 negara di dunia. Sehingga hal ini tentu saja indeks demokrasi di Indonesia masih belum bisa dikatakan baik karena dari implementasi sistem demokrasi di berbagai aspek masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan sosial termasuk dalam pengentasan kemiskinan. Kualitas demokrasi juga menentukan tingkat kesejahteraan yang dimana apabila kualitas demokrasi rendah akan memperlihatkan kualitas pemimpin yang rendah dan integritas pemimpin lemah sehingga kebijakan tidak berpihak pada masyarakat serta menimbulkan adanya korupsi yang pada akhirnya kemiskinan meningkat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2009-2019)

Gambar 1.2. Indeks Demokrasi Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2009 dan 2019

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan Indeks Demokrasi di Indonesia dalam rentang waktu antara tahun 2009 dan 2019 terjadi fluktuatif, yang dimana secara nasional Indeks Demokrasi terjadi peningkatan mulai dari tahun 2014 sampai 2019 dengan angka sebesar 73,04 hingga 74,92 yang menunjukkan bahwa selama 6 tahun terjadi peningkatan walaupun selama periode tersebut terjadi dengan cukup lambat. Sementara tahun 2009 sampai 2013 dengan angka sebesar 67,3 hingga 63,72 yang menunjukkan bahwa selama 5 tahun terjadi penurunan dan selama periode tersebut juga terjadi fluktuatif dengan mengalami peningkatan yang cukup lambat. Jika dibandingkan antara tahun 2009 dengan 2019 menunjukkan terjadi peningkatan sehingga tingkat indeks demokrasi telah mencerminkan terjadi secara membaik.

Dilihat dari perkembangan tingkat indeks demokrasi dengan 3 provinsi tertinggi dan 3 provinsi terendah di Indonesia. Tingkat indeks demokrasi pada provinsi DKI Jakarta sebesar 88,29, Kalimantan Utara sebesar 83,45, dan Kepulauan Riau sebesar 81,64 merupakan posisi yang tertinggi dan sudah termasuk kategori “Baik” pada tahun 2019. Sedangkan pada Provinsi Papua Barat sebesar 57,62, Sulawesi Tenggara sebesar 65,21 dan Papua sebesar 65,25 menunjukkan posisi terendah yang masih termasuk kategori “Sedang”.

Rendahnya Indeks demokrasi di Provinsi Papua Barat dikarenakan sering terjadi konflik yang cenderung merusak demokratisasi dengan berbagai isu atau kasus bahkan untuk berekspresi juga

sulit dilakukan karena adanya ancaman kekerasan dari aparat kepada masyarakat sehingga dari adanya konteks tersebut belum bisa diatasi. Sedangkan indeks demokrasi yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta dikarenakan mendapatkan dukungan dari semua pihak yang dimana DKI Jakarta juga merupakan ibu kota yang menjadi pusat aktivitas masyarakat maupun pemerintahan. Jika dibandingkan antara tahun 2009 dan 2019 menunjukkan terjadi peningkatan sehingga tingkat indeks demokrasi mencerminkan terjadi secara membaik walaupun masih termasuk kategori sedang. Hal tersebut karna ditandai masih rendahnya tingkat aspek hak-hak politik yang mencakup partisipasi politik dan kompetisi atau kualitas pemilu yang sebesar 70,71 yang diikuti aspek kebebasan sipil yang mencakup kebebasan berpendapat, berkumpul, dan bebas dari diskriminasi sebesar 77,20 dan yang tertinggi aspek lembaga demokrasi mencakup adanya peran atau tanggung jawab dari institusi sebesar 78,73.

Sen menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena adanya kediktatoran dalam stabilitas politik bukan hanya adanya bencana alam melainkan ada kaitannya dengan mewujudkan kebebasan kepada masyarakat untuk berkesempatan menyampaikan masalah agar bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah (Indro, 2013). Maka berhubungan dengan kemiskinan, pemerintah harus menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai sebuah masalah yang paling mendasar untuk diperhatikan dan diatasi (Yacoub, 2012). Salah satunya, Bojang (2017) menemukan bahwa di Ghana dan senegal menunjukkan bisa meningkatkan kemajuan dalam mengurangi kemiskinan dengan menggunakan sistem demokrasi. Begitu juga di Pakistan yang dapat mengurangi kemiskinan sebesar 66% antara tahun 2002 sampai 2016 melalui sistem demokrasi dengan adanya keterbukaan memberikan akses mendapatkan pelayanan ( Afzal et al., 2021).

Sedangkan di sisi lain, Sen (2011) menemukan bahwa di China memiliki sistem otoriter dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dibandingkan India yang memiliki sistem demokrasi. Begitu juga dengan Argentina yang pernah terjadi sistem otoriter tetapi negaranya menunjukkan cukup makmur secara ekonomi sama halnya dengan Korea Selatan yang pembangunan ekonominya cepat tetapi tidak disertai dengan hubungan demokratisasi (Nugroho, 2015). Indonesia juga pernah menghadapi sistem yang sangat demokrasi namun tidak memberikan keberhasilan dalam mencapai kesejahteraan karena stabilitas politik yang tidak baik (Tambunan, 2015). Jadi, tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena adanya keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan untuk mengakses sumber daya pembangunan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai data belum dapat menjelaskan tingkat kemiskinan berfluktuasi yang relatif menurun namun masih termasuk kategori tinggi sedangkan indeks demokrasi berfluktuasi yang relatif meningkat namun masih kategori “sedang” atau demokrasi tidak sempurna. Adapun kajian-kajian empiris yang diperoleh juga belum bisa memberikan gambaran yang pasti terkait pengaruh indeks demokrasi terhadap kemiskinan. Sehingga, penelitian ini dianalisis dengan judul “Pengaruh Indeks Demokrasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”. Maka terdapat tiga pertanyaan dalam penelitian, yaitu: 1) Apakah Aspek Kebebasan Sipil dari Indeks Demokrasi berpengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia. 2) Apakah Aspek Hak-Hak Politik dari Indeks Demokrasi berpengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia. 3) Apakah Aspek Lembaga Demokrasi dari Indeks Demokrasi berpengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari indeks demokrasi terhadap kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2009 sampai 2019. Adapun tujuan secara spesifik dalam penelitian, Yaitu: 1) Menguji dan menganalisis pengaruh Aspek Kebebasan Sipil dari Indeks Demokrasi terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2019. 2) Menguji dan menganalisis pengaruh Aspek Hak - Hak Politik dari Indeks Demokrasi terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2019. 3) Menguji dan menganalisis pengaruh Aspek Lembaga Demokrasi dari Indeks Demokrasi terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2019.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **2.1. Kemiskinan**

Menurut Kuncoro (2020), kemiskinan diartikan sebagai gambaran individu yang memiliki standar hidup rendah disebabkan penghasilan minim, kawasan tinggal layak yang kurang, rendahnya harapan hidup, dan kurang pengetahuan. Kemiskinan merupakan masalah yang multi dimensi sebab ada kaitannya dengan ketidakmampuan dalam mengakses beberapa fasilitas pendukung baik secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi oleh masyarakat itu sendiri yang dilihat melalui perspektif ekonomi politik (Aprianto 2016).

Terdapat beberapa alasan kemiskinan harus diukur ( *World Bank Institute, 2020*) yaitu:

1. Agar masyarakat miskin berada dalam pengawasan dan rencana
2. Agar terdapat identifikasi orang miskin dan intervensi untuk program pengentasan kemiskinan
3. Agar menjadi pengawasan maupun kebijakan intervensi terhadap orang miskin
4. Agar menjadi penilaian efisiensi lembaga pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan

Mengenai kemiskinan, Fernandez menyatakan bahwa terdapat beberapa ciri dengan meninjau dari berbagai aspek (Arsyad, 2016), yakni:

1. Aspek politik yang dimana untuk memperbaiki kehidupan mereka tidak ada akses untuk menyampaikan masalah yang dihadapi.
2. Aspek sosial ialah masyarakat miskin tidak diperhatikan bahkan terasingkan
3. Aspek ekonomi ialah terdapat kualitas sumber daya manusianya yang rendah, kesehatan yang tidak memadai, kualitas Pendidikan maupun keterampilan kurang sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan.
4. Aspek budaya atau nilai yang dimana sumber daya manusia terlalu kental akan budaya sehingga kualitasnya menjadi rendah seperti mudah menyerah, tidak bisa berpikir panjang untuk menyelesaikan masalah, serta etor kerja nya yang rendah.

Tambunan (2015) juga mengemukakan mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan bahwa ada yang berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh kondisi individu maupun situasi kolektif masyarakat yang ada. Sedangkan, secara konseptual kemiskinan diakibatkan oleh empat faktor, yakni:

1. Faktor individual ini berkaitan dengan beberapa aspek seperti aspek patologis. Kondisi kemiskinan disebabkan karena adanya perilaku, pilihan dan kemampuan yang dimiliki individu itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.